

BAB IV

KESIMPULAN

Peneliti merupakan masyarakat dari Kabupaten Banjarnegara maka sebagai masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berusaha mengamati kondisi di sekitar peneliti, sehingga pada akhirnya peneliti mengambil Tema “**Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor**”.

Dalam hal kesimpulan ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa, pemerintah kabupaten banjarnegara dari dahulu tidak memberikan kontribusi terhadap situasi yang sangat *urgent* atau sangat penting yang seharusnya lebih diutamakan masyarakatnya yaitu keselamatan, apalah daya memiliki infrastruktur yang banyak tapi akan rusak dan masyarakat banyak yang tidak selamat.

Dengan adanya data bahwa zona merah yang terdapat di kabupaten banjarnegara mencapai 70% maka sudah seharusnya di masukan kedalam rencana RPJMD dan menjadi skala prioritas dalam setiap melakukan pengelolaan wilayah banjarnegara.

Ketika, terjadi tanah longsor tahun 2017, pemerintah kabupaten banjarnegara membuat SK Bupati yang berisi tentang “Banjarnegara Siaga Darurat Bencana”,

mulai dari kebijakan inilah kami menemukan “*grand data*” untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

SK Bupati tersebut menjadikan BPBD Banjarnegara lebih agresif dalam bekerja dan bekerjasama dengan stakeholder yang lain, seperti Dindikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta masyarakat.

Salah satu kebijakan atau program kerja pemerintah melalui BPBD Banjarnegara adalah adanya Destana (Desa Tangguh Bencana) yang mana program tersebut di harapkan partisipasi yang aktif dari masyarakat sendiri, Karena justeru kekuatan terbesar dalam menangani bencana alam terutama tanah longsor berasal dari kekuatan gotong royong masyarakat.

Masyarakat sangat antusias terhadap program Destana tersebut Karena sebenarnya masyarakat juga telah menunggu adanya langkah pemerintah terhadap penanganan dan atau penanggulangan pencegahan bencana alam terutama tanah longsor yang sangat sering terjadi.

Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa mendapat tehnik yang benar terhadap penanganan bencana alam terutama tanah longsor, dan managemen kebencanaan, sehingga masyarakat dengan tanggap mengalokasikan dana desa (ADD) untuk menjalankan program Destana (Desa Tangguh Bencana) di desanya masing-masing.

Setelah partisipasi masyarakat yang sangat antusias pemerintah kabupaten semakin mendukung dan akan menampung aspirasi dari masyarakat tentang suksesnya program Destana sehingga pemerintah kabupaten akan memasukan program Destana tersebut ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga harapan masyarakat untuk mendapat pelatihan keberlanjutan program tersebut berjalan dengan lancar.

Jadi, pada intinya untuk menangani penanggulangan bencana alam terutama tanah longsor di kabupaten banjarnegara adalah dengan gotong royong dari setiap stakeholder antara pemerintah kabupaten, Badan Koordinasi Bencana, Dindikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, aparat keamanan, serta masyarakat sipil, sehingga terjadi integrasi yang baik.

SARAN

Dengan tidak menentunya bencana alam yang menimpa kabupaten ini pihak dari pemerintah dan desa bisa senantiasa bekerja sama untuk selalu sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana bahaya tanda tanda bencana alam. agar setidaknya kita selalu waspada.